



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 November 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 154592

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/98 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 785 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 3550 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Bangunan Seluas 29.3 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Bangunan Seluas 36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Bangunan Seluas 29.3 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 442.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 578.950.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	317.106.962
F. HARTA LAINNYA	Rp.	39.112.012
Sub Total	Rp.	4.127.668.974
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.127.668.974

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.